

Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Andi Muh. Riskil Hidayah¹ dan Andy Wardana²

¹ Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94118

² Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245
najmiahm79@gmail.com

Abstract. This research aims to determine the coordination of sub-district heads in administering government in Parigi District, Parigi Mourong Regency, Central Sulawesi Province. The basis of this research is to use a qualitative approach, with descriptive methods. Taking informants by determining five people as informants. In order to obtain the data needed in this research, researchers used Dann Sugandha's theory about internal coordination and external coordination, researchers also used data collection methods, namely, Observation, Interviews, Documentation. Data analysis is used with the appropriate techniques desired in data collection. So, to see the objectivity of the research, the author used the data analysis technique of Miles and Huberman's interactive model. The results of the research are that internal coordination between the sub-district head and his subordinate staff in the form of providing reports, providing suggestions and proposals, providing instructions has been carried out well. External Coordination is coordination carried out between the District Government and the government in the Parigi District area. External coordination between the sub-district governments has not been implemented optimally because there are still apparent weaknesses or lack of coordination in the administration of government carried out between the sub-district government and the government in the Parigi sub-district area which has not been implemented well, so development has not been optimal.

Keywords: Internal coordination, External coordination, Government practice.

1 Pendahuluan

Di jelaskan dalam PP Tentang Kecamatan Nomor 17 Tahun 2018 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang di limpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Dengan kedudukannya, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia dan sumber pembiayaan sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan peraturan pemerintah (Supriatna 2020).

Salah satu tugas Camat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang ada di tingkat kecamatan terutama kegiatan pembangunan mulai dari perumusan, perencanaan, sampai pada pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik, sekaligus memberdayakan masyarakat terutama dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting sehingga koordinasi Camat dapat terus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan, karena pemerintah harus menyadari bahwa masyarakat merupakan subjek pembangunan daerah.

Menurut George R. Terry menyebutkan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Harahap, Hasibuan, and Watrianthos 2020).

Namun terkadang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak jarang ditemui penyimpangan-penyimpangan, sehingga hasil yang dicapai kurang optimal. Di indikasi bahwa salah satu penyebab penyimpangan-penyimpangan tersebut karena lemahnya fungsi koordinasi dan pengawasan sehingga memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan niat jahatnya untuk mengambil keuntungan yang ada dan pada akhirnya merugikan sebagian rakyat Indonesia. Dibidang pembangunan, Koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenan dengan usaha menyatupadukan, sinkronisasi integrasi dan harmonisasi dalam menjalankan program-program pembangunan di kecamatan, Pemerintah kecamatan harus dapat menjalankan koordinasi pembangunan dengan efektif (Saroinsong, Posumah, and Laloma 2015).

Menyadari akan hal di atas, seharusnya fungsi koordinasi diterapkan dengan baik dan benar. Dengan adanya fungsi koordinasi yang baik dan benar maka segala program perencanaan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pada pelaksanaan tersebut fungsi evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan akan mampu meminimalisir penyimpangan yang terjadi.

Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di

kecamatan itu sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Parigi masih nampak adanya kelemahan atau kurangnya dalam hal koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan antara pemerintah Kecamatan dan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi terkesan belum optimal dan efektif.

Koordinasi Ekstern yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Kecamatan yang mempunyai kedudukan yang sama seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Parigi di wilayah Kecamatan Parigi sudah cukup baik tetapi belum terlaksana dengan maksimal di karenakan belum rutin dilaksanakan rapat koordinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini ditunjukkan oleh indikasi masih adanya program/kegiatan pembangunan dari suatu unit kerja yang belum terlaksana dengan sempurna. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh unit kerja seperti hanya sebagian saja yang terlaksana dalam proses pembangunan itu sendiri, dikarenakan kurang rutin dilaksanakannya pertemuan atau rapat koordinasi antara aparat Pemerintah Kecamatan Parigi dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pembangunan yang berhasil di Kecamatan maka koordinasi camat harus dilakukan dengan baik serta efektif pada tahap perencanaan program dan pelaksanaan program pembangunan tersebut. Pengarahan dana dan daya tenaga efisien perlu di lakukan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat karena hal itu ikut menentukan keberhasilan pembangunan sehingga dengan demikian pembangunan dengan sumber daya manusia perlu di tingkatkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan oleh camat Pallangga sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008, hal itu di buktikan dari cara camat Kecamatan Pallangga memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung agar program yang di rencanakan mencapai hasil yang maksimal serta melakukan evaluasi dengan menerapkan fungsi POAC (Planning, organizing, actuating dan controlling) (Ade, Yunus, and Rusli 2013).

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Kauditan dilaksanakan dengan baik dan cukup efektif. Hal ini berarti bahwa koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan menciptakan atau mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integral dari program- program pembangunan di kecamatan, dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan teratur, tertib, lancar, dan berhasil (Saroinsong, Posumah, and Laloma 2015).

Oleh karena itu camat harus mengefisienkan sarana atau bentuk koordinasi pembangunan di kecamatan seperti rapat koordinasi, konsultasi, permintaan laporan, penyampaian data/informasi dan menggerakkan aparat pemerintah untuk turut serta berperan di dalamnya. Terkadang Camat memiliki kriteria dan kemampuan pribadi dalam hal ini adalah karismatik untuk menjadi seorang *Top leader* yang baik dan tangguh. Karena posisi Camat bukan saja hanya dilihat sebagai pimpinan tetapi juga sebagai tokoh panutan.

Keberadaan Camat yang merupakan aset daerah seharusnya dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam mempengaruhi berbagai aparat pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat untuk bersama melaksanakan pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah kearah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya sarana atau bentuk koordinasi pembangunan tersebut seringkali belum secara optimal dapat diwujudkan secara efektif di Kecamatan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Koordinasi

Koordinasi pada umumnya dapat diartikan sebagai tata hubungan untuk mencapai kesamaan atau kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam mencapai tujuan bersama mereka diikat dengan satu prinsip-prinsip yaitu koordinasi. Dengan demikian didalam koordinasi terkandung unsur-unsur kerjasama, integrasi, sinkronisasi, dengan demikian koordinasi mengutamakan keserasian dan keterpaduan.

Handoko yang mendefinisikan bahwa koordinasi adalah sebagai proses penintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan- satuan yang terpisah suatu organisasi secara efisien. Menurut Handoko kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling

ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya (Bakhtiar 2019).

Sondang P.Siagian mendefinisikan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan seefisien mungkin (Susana 2017).

Soewarno Handyaningrat Koordinasi di maksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi unruk mencapai tujuannya. Koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan desentralisasi. Dalam perkembangan masyarakat dan upaya pembanunan yang semakin kompleks, pembangunan yang serba terpusat tidak lagi menjamin efesiensi dan efektivita pelayanan masyarakat dan pembangunan. Akan tetapi pada dasarnya ada kecenderungan divergensi dalam organisasi yang terpisah di perlukan koordinasi sebagai alternatif (Aman and Satlita 2018).

Bayu Suryaningrat Koordinasi berkaitan dengan tugas menghubungkan dan mengikat sejumlah usaha dengan tujuan menjamin tercapainya tujuan secara sukses (Suryaningrat 1991). Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat bahwa Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itudilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Suryaningrat 1991).

Koordinasi merupakan penyatuan dan penyelarasan semua kegiatan, menurut Athoillah bahwa adanya Koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan (Athoillah and Putri 2023).

Hasibuan berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasi unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mecapai tujuan organisasi (Hasibuan 2004).

Menurut Manullang menyebutkan bahwa Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Manullang and Hutabarat 2016).

Koordinasi dalam pemerintah hakikatnya merupakan upaya memadukan, mengintegritaskan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan serta segenap gerak, langka dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang diamana dalam pelaksanaannya sampai pada pengawasan dan pengadilan.

Apabila dalam koordinasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko berpendapat bahwa manfaat koordinasi antara lain (Ningrum 2020):

- Dengan koordinasi dapat di hindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap aktifitas dalam organisasi.
- Menimbulkan kesadaran di antara pegawai untuk saling membantu.

Sedangkan menurut Siagian tujuan koordinasi yaitu (Widiaswari 2015):

- Untuk mencegah konflik dan kontradiksi
- Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat
- Untuk mencegah pemborosan

- Untuk mencegah kekosongan ruang dan waktu
- Untuk mencegah terjadinya perbedaan dan pelaksanaan.

Selain itu, tujuan dilakukannya koordinasi yaitu:

- Meraih dan menjaga keefektifan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan kesimbangan di antara aktivitas yang saling berkaitan.
- Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik dan menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktifitas independen melalui kesepakatan yang mengakomodir seluruh elemen yang berkaitan.
- Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan menjaga tingka laku yang saling merespon dan mengantisipasi disetiap unit kerja, baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini dilakukan supaya kesuksesan setiap unit tidak mengganggu dan diganggu oleh unit lainnya. Oleh karena itu sangat di perlukan koordinasi dengan jaringan komunikasi yang efektif.

2.2 Jenis Koordinasi

Didalam koordinasi di perlukan kerja sama yang erat dan efektif, karena dengan adanya koordinasi bisa menciptakan sinergi dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang, unit atau organisasin yang menghasilkan output masing-masing orang, unit atau organisasi bila mereka bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis Koordinasi menurut para Ahli sesuai dengan lingkup dan arahnya.

Jenis-jenis koordinasi menurut Hasna, Haris, dan Lamatenggo (2018), yaitu:

- Koordinasi vertical yaitu menunjukkan pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan yang disatupadukan diantara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkat organisasi yang berlainan. Contohnya persetujuan mengenai pengeluaran modal, katakan pada tingkat wakil direktur yang dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan perlengkapan modal pada tingkat pelaksanaan.
- Koordinasi horizontal adalah pengembangan hubungan-hubungan yang lancar

diantara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama. Misalnya arus informasi yang tepat dari pemasaran ke pabrik tentang penjualan sehingga pabrik dapat mengembangkan rencana produksi yang efisien.

Sedangkan George R. Terry (Terry 2021) membagi 4 jenis koordinasi yaitu:

- Koordinasi internal
- Koordinasi eksternal
- Koordinasi vertikal
- Koordinasi horizontal.

Koordinasi internal berhubungan dengan penyatupaduan kegiatan-kegiatan, ide-ide, dan orang-orang dalam suatu organisasi. Sedangkan Koordinasi eksternal berhubungan dengan penyatupaduan kegiatan-kegiatan dari suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan lain dan kekuatan-kekuatan serta keadaan-keadaan eksternal bagi organisasi tersebut.

Dalam Koordinasi vertikal penyatupaduan kegiatan-kegiatan adalah di antara tingkat berturut-turut dalam struktur organisasi, misalnya pimpinan, pembantu pimpinan dan pegawai pelaksana serta kegiatan-kegiatan di satupadukan melalui koordinasi. Sedangkan Koordinasi Horizontal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi dan sedikit lebih sulit pencapaiannya ketimbang koordinasi vertikal.

Jenis-jenis Koordinasi menurut Suhermanudin dan Zakiyuddin (2021):

- Koordinasi intern yaitu koordinasi antara pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi
- Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi
- Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unsur unit yang memunyaitingkat heirarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi yang sederajat atau setingkat.

- Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya
- Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya.
- Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, unit atau antar organisasi yang di dasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Di dalam suatu koordinasi memungkinkan adanya suatu kesatuan, keterpaduan antar unit, antar pejabat serta keharmonisan organisasi. Dalam hal ini melalui pertemuan-pertemuan dalam suatu proses kegiatan maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar dikarenakan suatu koordinasi ini sangat penting apabila suatu kesatuan saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar berjalan mencapai tujuannya. Pandangan seperti ini yang disebut pendekatan sistem merupakan alat dan teknik yang dapat membantu administrator.

Dalam menciptakan Koordinasi bahkan dalam pelaksanaan seluruh fungsi administrator yang lain, adalah kemauan atau semangat orang-orang untuk membantu administrator. Dengan kata lain, unsur yang paling penting adalah semangat kerjasama dari seluruh pihak yang harus bekerja secara terkoordinasi. Oleh karena itu, keterampilan seorang administrator adalah mendapatkan dukungan, menarik perhatian dan menarik hati orang lain sehingga mereka dengan rela dan senang hati membantu administrator yang bersangkutan, sarana yang paling penting di gunakan dalam Koordinasi saling berkomunikasi dan human relation.

3 Metode

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Pengambilan informan dengan menetapkan 5 orang yang menjadi informan. Guna memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dann Sugandha tentang koordinasi intern dan koordinasi ekstern, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu, Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data yang di gunakan dengan teknik sesuai yang diinginkan dalam pengumpulan

data. Maka untuk melihat objektivitas penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

4 Hasil dan Pembahasan

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jabatan Camat adalah jabatan karier yang di jabat oleh PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bertugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh kepala daerah Kecamatan.

Secara Struktur Camat berada langsung di bawah Bupati, akan tetapi pertanggung jawabannya di lakukan secara administrative melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka otonomi daerah, tugas dan fungsi Camat di tempatkan sebagai seorang pemimpin yang di anggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian di percayakan untuk mengatur masyarakatnya.

Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh Camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Sebab Camat memilki peranan yang penting sebagai administrator di bidang pembangunan, antara lain pengarahan usaha untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan, sehingga membutuhkan suatu koordinasi. Koordinasi Intern merupakan pola koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Parigi kepada staf bawahannya atau sebaliknya. Koordinasi dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan sedangkan dari atasan dalam hal ini camat berupa pemberian instruksi/petunjuk. Koordinasi Ekstern merupakan koordinasi yang bertujuan untuk saling menukar informasi.

Koordinasi Camat diwilayah Kecamatan Parigi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selain itu koordinasi Camat merupakan sistem, sehingga sistem tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi dan kesepahaman antara Camat dengan bawahannya, oleh karena itu penerapan koordinasi harus

mempertimbangkan kebutuhan agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin.

Salah satu aspek penting koordinasi Camat adalah bagaimana cara Camat Parigi dalam membuat dan mengorganisasikan segala keputusan-keputusan bersama, maka segala keputusan-keputusan yang di buat haruslah melalui koordinasi, hal ini di maksud agar dapat di sesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Wilayah Kecamatan Parigi sehingga dapat terealisasikan dengan baik.

4.1 Koordinasi Intern

Koordinasi Intern merupakan pola koordinasi yang di laksanakan oleh Camat Parigi kepada staf bawahannya atau sebaliknya. Koordinasi dari staf bawahannya berupa pemberian laporan-laporan, pemberian usulan dan saran sedangkan dari atasan dalam hal ini Camat berupa pemberian petunjuk.

Pelaksanaan sistem Koordinasi Intern di lakukan Camat dengan cara mengadakan dengan pertemuan-pertemuan rutin atau berskala, adapun sistem Koordinasi Intern yang sudah di laksanakan rutin atau berskala tersebut adalah dengan mengadakan pertemuan secara rutin yan di pimpin langsung oleh Camat dengan staf bawahannya yaitu Sekretaris Camat dan kepala-kepala Seksi yang ada di Kecamatan Parigi. Dalam pertemuan rutin tersebut bertujuan dalam rangka membahas sebagian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Srikandi Puja, S.Kom, M.A.P (Camat) yang menyatakan bahwa:

“Camat Parigi melaksanakan koordinasi dengan cara melakukan pertemuan secara rutin yang sudah di tetapkan dengan jadwal yang sudah ada sebelumnya dengan para bawahannya, seperti Sekretaris Camat dan Kepala-kepala Seksi yang ada di Kantor Kecamatan Pari-gi” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2022)

Dalam pertemuan rutin tersebut menunjukkan keterlibatan Camat dalam Koordinasi Intern dengan Staf bawahannya dengan menunjukkan indikasi Camat dalam melaksanakan koordinasi dengan cara menghadiri dan memimpin secara langsung rapat-rapat koordinasi dengan staf bawahannya yang berada di Kantor Kecamatan Parigi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syafaat Pampi, S.SOS (Sekretaris Camat) yang menyatakan bahwa:

Camat sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga tidaklah heran selama ini Camat selalu terlibat dalam rapat koordinasi dengan para staf bawahannya untuk membahas tentang pemerintahan maupun pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Parigi. (Hasil Wawancara pada tanggal 25 Maret 2022)

Selain melihat keterlibatan Camat maka dapat dilihat dari rapat yang di adakan oleh Camat, bahwa rapat dengan bawahannya merupakan prioritas Camat dalam pelaksanaan rapat koordinasi, selain keberadaan Camat sebagai pimpinan Camat juga mempunyai fungsi sebagai pengawas kepada staf bawahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal, S.Sos (Kasi Pembangunan) yang menyatakan bahwa:

“Harus saya akui, rapat koordinasi antara Camat dan bawahannya tidak terlalu banyak khususnya pertemuan dengan aparat yang ada dikantor Camat Parigi tetapi koordinasi yang di adakan Camat sering di laksanakan, apabila Camat berhalangan hadir biasanya digantikan oleh Seketaris Camat” (Hasil Wawancara pada tanggal 29 Maret 2022)

Untuk lebih memperjels hubungn koordinasi Intern yang dilaksanakan oleh Camat Parigi di maksudkan dapat di lihat dari penjelasan di bawah ini:

Pemberian petunjuk ke bawahannya

Koordinasi Intern merupakan upaya untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya karena sesuai denga tugas dan tanggung jawab Camat selaku kepala wilayah Kecamatan. Secara otomatis jika menghendaki pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berhasil dengan baik harus melibatkan semua unsur terkait di wilayah kerjanya tersebut termaksud staf bawahannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syafaat Pampi, S.SOS (Sekretaris Camat) yang menyatakan:

“Pada saat rapat koordinasi Camat selalu memberikan petunjuk untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Parigi dengan baik dan juga memberikan arahan dan saran-saran apa saja yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2022).

Pada saat dilaksanakan rapat Koordinasi antara Camat dan Aparat pemerintah di Kecamatan Parigi, Camat selalu memberikan petunjuk kepada bawahannya yang berada

di dalam Kantor Kecamatan Parigi, sehingga nantinya dalam pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya dan Camat juga selalu memberikan kesempatan kepada stafnya untuk selalu bertanya tentang apa saja yang tidak di mengerti.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal, S.Sos (Kasi Pembangunan) yang menyatakan bahwa:

“Pada saat dilaksanakan rapat koordinasi saya selalu berusaha untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum saya mengerti atau ada hambat-an-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pada saat itu juga Camat memberikan petunjuk/arahan untuk bagaimana agar nantinya dapat menentukan keputusan yang tepat” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2022).

Oleh karena itu arahan-arahan yang berupa petunjuk langsung yang diberikan Camat kepada bawahannya yang berda di kantor Kecamatan Parigi dapat diketahui manfaatnya. Manfaat petunjuk langsung merupakan penyamaan persepsi agar nantinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Kecamatan dapat memahami apa yang dikerjakan sekaligus menciptakan kerja sama yang baik antara Camat dengan bawahannya.

Dalam hal ini Camat selaku koordinator Pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan berupaya memberikan petunjuk tentang aturan-aturan pelaksanaan pembangunan terhadap bawahannya sebagai dasar pengetahuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Parigi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerja sama antara unsur-unsur terkait yaitu Camat sebagai pemimpin dan staf bawahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga sistem koordinasi intern di kantor Kecamatan Parigi juga bagian dari petunjuk langsung oleh Camat terhadap bawahannya.

Petunjuk langsung dari Camat terhadap bawahannya merupakan bagian yang penting untuk keselarasan langkah untuk meningkatkan kerja sama di antara pegawai Kecamatan. Sehingga berdampak kepada pemahaman pegawai Kecamatan terhadap berbagai kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Nur Srikandi Puja, S.Kom, M.A.P (Camat) yang menyatakan bahwa:

“Setiap rapat koordinasi saya selalu memberikan arahan-arahan atau petunjuk secara langsung agar tidak adanya perbedaan persepsi antar satu dengan lainnya, hal ini diharapkan menjadi suatu acuan atau pan-duan dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan yang sudah di rencanakan dalam rapat koordinasi di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong” (Hasil wawancara pada tanggal Maret 2022).

Melalui arahan-arahan dan berupa kebijakan-kebijakan yang di laksanakan oleh Camat kepada staf bawahannya kemudian di lanjutkan dengan penjabaran di setiap masing-masing seksi melalui komunikasi timbal balik, baik antara Camat dan bawahannya.

Pemberian Laporan-laporan

Dalam rapat koordinasi Intern tersebut, selain membahas pelaksanaan-pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Parigi juga mengambil kebijakan yang akan di laksanakan, karena rapat koordinasi tersebut sebagai wadah untuk memberikan laporan-laporan tentang hasil kegiatan yang di laksanakan di masing-masing bagian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Srikandi Puja, S.Kom, M.A.P (Camat) yang menyatakan bahwa:

“Tentunya setiap rapat koordinasi, setiap seksi-seksi di kantor Camat Parigi Kabupaten Parigi Moutong selalu saya mintakan laporan-laporan tentang apa saja yang telah di laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dengan apa yang telah saya berikan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2022).

Saat dilaksanakan rapat Koordinasi antara Camat Parigi bersama setiap seksi-seksi Kecamatan Parigi, Camat pasti meminta laporan-laporan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi, agar nantinya Camat dapat mengetahui hambatan apa saja yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing seksi dalam melakukan kegiatan yang di berikan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal, S.Sos (Kasi Pembangunan) menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan tanggung jawab setiap masing-masing bawahannya harus di laporkan secara berskala pada saat rapat

koordinasi dengan Camat sehingga dapat di ketahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di setiap seksi dalam melaksanakan tugasnya” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2022).

Dari hasil wawacara tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya koordinasi intern juga sebagai media untuk memberikan laporan-laporan dari staf-staf Pemerintah Kecamatan kepada Camat Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Permintaan Usulan dan Saran

Dalam hal ini Camat berupaya melakukan koordinasi dengan staf bawahannya, untuk memberikan saran dan usulan tentang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Parigi sekaligus menyangkut kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang di sertai dengan pemikiran-pemikiran untuk pemecahan masalah yang dihadapi, dengan demikian akan terbangun rasa tanggung jawab serta motivasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan. Usulan dan saran dari bawahan di harapkan menjadi masukan bagi Camat sehingga akan menjadi alternatif-alternatif bagi pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong kearah yang lebih baik kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Srikandi Puja, S.Kom, M.A.P (Camat) yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, banyak sekali usulan-usulan yang di berikan oleh Sekretaris Camat, Aparat Kecamatan serta Seksi-seksi untuk permintaan Pembangunan, tetapi tidak semua di laksanakan secara bersamaan tetapi semua usulan yang mengenai pembangunan kita dilakukan secara bertahap” (Hasil wawancara tanggal 22 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal, S.Sos (Kasi Pembangunan) menyatakan bahwa:

“Disetiap rapat koordinasi Camat selalu memberikan kesempatan semua seksi-seksi Kecamatan untuk memberikan usulan-usulan atau sa-ran mengenai pelaksanaan pembangunan yang mereka inginkan untuk peningkatan kesuksesan Pembangunan di kecamatan Parigi yang lebih baik lagi kedepannya” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2022).

Koordinasi Intern merupakan media usulan dan saran untuk pemerintah Kecamatan

Parigi dalam hal ini Camat dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafaat Pampi, S.SOS (Sekretaris Camat) menyatakan bahwa:

“Pada setiap rapat koordinasi antara Camat dan bawahannya sering muncul usulan dan saran dari bawahannya, sehingga dari hasil rapat koordinasi tersebut di temukan jalan terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Informan menunjukkan bahwa koordinasi Intern telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat di lihat dengan adanya pemberian petunjuk antara Camat kepada bawahannya, pemberian laporan serta pemberian usulan-usulan dan saran kepada Camat Parigi.

4.2 Koordinasi Ekstern

Koordinasi Ekstern merupakan koordinasi yang dilaksanakan antara aparat Kecamatan dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi yang mempunyai kedudukan yang sama. Koordinasi Ekstern ini merupakan koordinasi yang bertujuan untuk menukar informasi yang di perlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Metode koordinasi Ekstern tidak jauh beda dengan koordinasi Intern, yang membedakan hanya kedudukan dari Aparat Pemerintah Kecamatan yang sama. Dengan demikian koordinasi Ekstern merupakan faktor yang dominan yang memperlancar di setiap pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Srikandi Puja, S.Kom, M.A.P (Camat) yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sangatlah di perlukan rapat koordinasi antara pemerintah-pemerintah yang ada di Kecamatan Parigi atau yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Parigi untuk saling di butuhkan tukar informasi untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2022).

Selain itu, koordinasi Ekstern yang di lakukan oleh pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga merupakan suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan dan waktu yang telah di lakukan oleh berbagai satuan unit terpisah upaya tugas-tugas tercipta harmonis, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Untuk menindak lanjuti koordinasi Ekstern, maka usaha yang di lakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung antar pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Di perlukan usaha-usaha dalam meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di lakukan secara langsung untuk membahas mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan di laksanakan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

Sedangkan upaya lain adalah dengan mengadakan pertemuan secara rutin dengan aparat pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi untuk melaksanakan rapat koordinasi bulanan. Koordinasi yang bersifat Ekstern biasanya di laksanakan setiap bulan atau dua bulan terutama dalam kaitannya dengan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sebagai upaya membahas atas program yang di laksanakan. Koordinasi sebagai tugas umum pimpinan dalam hal ini yakni Camat, maka pelaksanaan koordinasi Ekstern akan melibatkan unsur yang terkait di wilayah kerjanya dan juga selalu berhubungan satu sama lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramdan Labake S.Pdi (sekretaris lurah masigi) menyatakan bahwa:

“Setahu saya koordinasi ekstern memang ada di adakan petemuan an-tar Camat dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi dalam membahas hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi hal tersebut belum rutin di laksanakan.”

Koordinasi antara Camat dengan pemerintah bawahannya di wilayah Kecamatan Parigi sebagai media komunikasi antara Camat dengan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi guna menyampaikan informasi antara lain, program kerja yang akan di laksanakan, perubahan aturan, cara kerja dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya. Dengan adanya informasi seperti di atas akan timbul kesepahaman di antara Camat dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi apabila terjadi persepsi yang sama terhadap tugas dan pekerjaan akan menimbulkan atau melahirkan kesatuan tindakan sehingga hal tersebut mempengaruhi

koordinasi yang di laksanakan oleh Camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Nur Tagunu (Masyarakat) menyatakan bahwa:

“Menurut saya di butuhkan kerja sama antara Camat dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi agar bisa terjalin hubungan yang baik, karena jika di bangun dengan komitmen yang tinggi harus di pegang baik oleh kedua belah pihak, sehingga menurut saya pertemuan antara Camat dan pemerintah di wilayah Kecamatan Parigi kedepannya agar lebih rutin lagi, agar kedepannya penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan selaku masyarakat”

Pada dasarnya Koordinasi Ekstern juga berpengaruh pada kerja sama antara Camat dengan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi sehingga kerja sama tersebut dapat melahirkan kesepahaman tentang arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pembangunan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa Koordinasi Ekstern antara Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Parigi dan Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan Parigi sudah cukup baik tetapi belum maksimal, di karenakan belum rutin dilaksanakan rapat koordinasi dan masih banyak pembangunan yang belum optimal.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah, menggunakan koordinasi Intern dan Koordinasi Ekstern. Koordinasi Intern di mana dari staf bawahannya seperti aparat pemerintah yang ada di kantor kecamatan Parigi yang dimana harus ada pemberian laporan-laporan, pemberian saran dan usulan. Sedangkan dari atasan dalam hal ini Camat Parigi berupa pemberian arahan atau petunjuk, dari hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Intern telah terlaksana dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya. Sedangkan Kordinasi Ekstern merupakan Koordinasi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu Pemerintah Kecamatan dalam Hal ini Camat Parigi dengan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi. Selain itu, Koordinasi Ekstern ini merupakan Koordinasi yang bertujuan untuk menukar informasi yang di perlukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, dari hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Ektern antara aparat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi sudah cukup baik tetapi belum maksimal, masih perlu di tingkatkan kualitasnya baik pada penyelenggaraan maupun pada saat pelaksanaannya. Dapat dilihat dari belum rutin di laksanakan rapat koordinasi dan juga masih adanya pembangunan yang belum optimal.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan peran Camat dalam hal ini Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, agar selalu diciptakan kerja sama serta saling berkomunikasi dan berbagi dalam hal informasi tentang apa saja kendala yang didapatkan dilapangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih intensifnya antara camat dan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Parigi dalam hal Koordinasi harus rutin dilaksanakan dan saling berkomunikasi serta Saling mengingatkan. Selain itu, dalam koordinasi dalam hal membahas penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan semua unsur yang berkepentingan, agar nantinya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi ketidaksinambungan dan saling tumpang tindih, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tersebut bisa berjalan sesuai yang diinginkan.

References

- Ade, Andi Muhammad, Rabina Yunus, and Andi Muhammad Rusli. 2013. "Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*: 89–100.
- Aman, Azhar Gasyim, and Lena Satlita. 2018. "Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern." *Journal of Public Policy and Administration Research* 3(2): 162–75.
- Athoillah, Muhammad, and Rani Kurnia Putri. 2023. *Sistem Informasi Manajemen*. CV Pena Persada.
- Bakhtiar, H M. 2019. "Pengaruh Motivasi, Koordinasi, Komunikasi, Kepuasan Kerja Dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun." *Magenta* 7(1): 31–34.
- Harahap, Junaidi Mustapa, Muhammad Irwansyah Hasibuan, and Ronal Watrianthos. 2020. "Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan Dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu." *Kapital: Jurnal Ilmu Manajemen* 2(1): 1–12.
- Hasibuan, Gindo Maraganti. 2004. "Model Koordinasi Kelembagaan Pengelolaan Banjir Perkotaan Terpadu." *Disertasi Perencanaan Wilayah USU. Medan*.
- Hasna, Asmu, Ikhsa Haris, and Nina Lamatenggo. 2018. "Keefektifan Koordinasi Kepala Sekolah Dalam Mengintegrasikan Program Dan Kegiatan Di Sma Negeri 1 Manunggu Kabupaten Boalemo." *Jurnal Pascasarjana* 3(1).
- Manullang, Marihot, and Esterlina Hutabarat. 2016. "Manajemen Pemasaran." *Yogyakarta. Indomedia Pustaka*.
- Ningrum, Dhesti Widya Nurhasanah. 2020. "Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang." *Perspektif* 9(1): 46–54.

- Saroinsong, Nitreesilia, Hanny Johnny Posumah, and Alden Laloma. 2015. "Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 4(32).
- Suhermanudin, Suhermanudin, and Ahmad Zakiyuddin. 2021. "Koordinasi Pengembangan Objek Wisata Tanjung Duriat Kabupaten Sumedang." *Jurnal Sosial Politik Unla* 26(1): 96–106.
- Supriatna, Dadang. 2020. "Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(2): 310–30.
- Suryaningrat, B. 1991. "Perumusan Kebijakanaksanaan Dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia (21c Ed.)." *Bina Aksara*.
- Susana, Nofela Sari Mitra. 2017. "Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang." *JURNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN* 1(3): 965–74.
- Terry, George R. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Widiaswari, Roro Rukmini. 2015. "Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru." *AL'ULUM* 63(1).

Disclosure statement

The authors declare no competing interests.